

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko, Sutoro. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. (Yogyakarta: APMD Press, 2004)
- Gaffar, Afan. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Ismail. "Etika Pemerintahan; Norma, Konsep Dan Praktek Etika Pemerintah," 2017, 181.
- Kansil, CST dan Christine S.T Kansil. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Edisi Revisi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Mariun. Asas-asas Ilmu Pemerintahan. (Yogyakarta: Seksi Penerbitan Fisipol UGM, 1999).
- Ndraha, Taliziduhu. Kibernetology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

Jurnal

- Alfitri, A. "Ideologi *Welfare State* Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." Jurnal Konstitusi 9, No. 3 (2012): 449–72.
- Arliman S, Laurensius. "Konsep Dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak Dalam Rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi Laurensius Arliman S ©." Nurani 17, No. 1 (N.D.): 49–64.
- Giraud, Francois, Philippe Zarlowski, Olivier Saulpic, And Marie-Anne Lorain. "Management Control: An Overview." *Fundamentals Of Management Control*, 2011, 1–28.
- Glendoh, Sentot Harman. "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi." Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (*Journal Of Management And Entrepreneurship*) 2, No. 1 (2000): 43–56–56.
- Hariyanto, Hariyanto. "Priayisme Dan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN): Studi Status Group Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 3, No. 2 (2012): 111–29.
- Ilyas, Husin, Afif Syarif, And Netty. "Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" 14 (2012): 47.
- Ismansyah, And Purwanto Agung Sulisty. "Permasalahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanggulangannya." Jurnal Demokrasi IX, No. 1 (2010): 43–60.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. Sosiologi Perdesaan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*. Vol. 53, 2015.
- Keban, Yeremias T. "Good Governance Dan Capacity Building Sebagai Indikator Utama Dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan." Universitas Gajah Mada, No. 20 (2000): 1–12.
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar

- Menggabungkannya [*Quantitative And Qualitative Research And Basic Rationale To Combine Them*].” *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, No. 1 (2011): 128.
- Ncert. “After Studying This Chapter , You Should Be Able To :” *Business Studies* 16 (2015): 31–56
- Negara, Stie Trisna, O K U Timur, Sumatera Selatan, Jl Mp, Bangsa Raja, No Belitang, O K U Timur, And Sumatera Selatan. “Kabupaten Oku Timur” 16, No. 1 (2018): 28–38.
- Octavia, E V I. “Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung,” No. 38 (2013): 43–52.
- Pemerintahan, Kerja, Desa Kali, And O K I Kecamatan. “Pengawasan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Kerja Pemerintahan Desa Kali Oki Kecamatan Tombatu.” *Jurnal Eksekutif* 2, No. 2 (2017).
- Pengawasan, Analisis Fungsi. “Analisis Fungsi Pengawasan (Takaendengan) 291,” N.D., 291–310.
- Solikhudin, Muhammad. “Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, No. 1 (2017): 163–87.
- Sugiman, Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, No. 1 (2018): 82–95.
- Sugiyanto, Eko. *Pengendalian Dalam Organisasi. Journal Of Chemical Information And Modeling*. Vol. 53, 2016.
- Sulistiani, Dwi. “Good Government Governance Menuju Pemerintah Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Kkn).” *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi* 8, No. 1 (2018): 1.
- Thaha, Rasyid. “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah.” *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, No. 1 (2009): 39–62.
- Usmany, Budiarto, Salmin Dengo, And Very Londa. “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Administrasi Publik Unsrat* 3, No. 41 (2016).

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tidak Pidana Korupsi

Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari KKN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pertanggung Jawaban Kinerja

Instansi Pemerintahan

Undang- Undang Nomr 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa